BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani,2005: 3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Robert Jackson dan Georg Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009:34).

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputiterorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya

> dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional".

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau

> bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy. 2002 : 116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan Kepentingan Nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep 'power' kepentingan 'interest' didefinisikan ke alam terminologi power (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *'power'* yang

ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu. 2011: 163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh fakto-faktor domografi, karekter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

> Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para mpemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadapjnegara lain bersifat kerjasama maupun konflik (Coulumbis dan Walfe. 2004 : 115)

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan

bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi *partner* dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu. 2011: 165) .

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah *'relation'* (Goldstein dan Pevehouse. 2010 : 71).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus

segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu. 2008 : 67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (power) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antarnegara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industry
    d. Kapasitas Produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
    e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
    f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives*, *national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri,

namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia.

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002: 116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lainlain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Walfe. 2004 : 110).

2.1.3 Diplomasi

2.1.3.1 Konsep Diplomasi

Para pakar memberi definisi yang berbeda terhadap kata diplomasi. *The Oxford English Dictionary* member konotasi sebgai berikut: “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat”.

Menurut *The Chamber's Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah senia berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik. (Shoelhi, 2011:74)

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat dan kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi sebagai berikut :

> "Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung" (Djelantik, 2008:3).

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahana

negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman.

Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah " Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi". Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan.

Sebagai aktor diplomatik, pekerjaan diplomat bukanlah menyusun kebijakan; peranan itu dimainkan oleh politikus dan negarawan. Sebgai pelaksanaan kebijakan luar negeri, diplomat menyampaikan detail kebijakan pemerintahan negara lain, menjelaskannya, dan memperoleh dukungan, dan jika dikehendaki, menegosiasikan kesepakatan untuk meningkatkan dan mewujudkannya. Kondisi ini memungkinkan diplomat untuk menikmati keuntungan dari dua dunia; kegagalan dapat dislalahkan kepada kebijakan, sementara keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan tetapi juga dalam mempresentasikan kebijakan tersebut. Diplomat dapat memberi nasihat kepada pemerintahannya mengenai kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi posisi tawar dan kekuatan sebuah negara (Djelantik, 2008:4-5).

Pada masa ini, diplomasi telah dikategorikan menurut metode yang dipakai dalam hubungan-hubungan diplomatik. Kategori-kategori ini dibagi dalam berbagai tipe,yaitu:

1. Diplomasi Borjuis-Sipil

   Diplomasi ini merupakan diplomasi borjuis atau diplomasi sipil yang didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian kompromi antara mereka yang berselisih melaui negosiasi adalah pada umumnya lebih menguntungkan daripada penghancuran total musuh-musuh.

2. Diplomasi Demokratis

   Diplomasi terbuka atau disebut juga diplomasi demokratis menunjukkan bahwa diplomasi harus dijalankan secara terus terang dan terbuka serta memperoleh pengawasan penuh dari publik.

3. Diplomasi Totaliter

   Bahwa negara yang menggunakan diplomasi totaliter, pembuatan keputusan tidak berada di bawah pengawasan rakyat. Satu orang atau satu kelompok kecil bisa mengambil keputusan akhir dalam segala hal dan dalam waktu yang begitu singkat.

4. Diplomasi Preventif

   Diplomasi ini mempunyai kedudukan penting, khusus dalam kasus-kasus dimana konflik permulaan bisa dikatakan sebagai akibat dari, atau secara tidak sengaja menimbulkan resiko bagi terciptanya suatu kekosongan kekuasaan si antara blok-blok utama.

5. Diplomasi Provokatif

   Diplomasi ini dilancarkan dengan tujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara atau untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar membenci atau menentukan kebijakan politik suatu negara atau mendobrak kemapanan yang tidak disukai atau menentang aturan yang berlaku (Shoelhi, 2011:79-81).

2.1.3.2 Bentuk-Bentuk Diplomasi

Diplomasi dalam artian komunikasi diplomatik sering kali terjadi dan berlangsung dalam bentuk komunikasi kelompok kecil (*small group communication*) atau kelompok sedang (*middle group communication*) dengan jumlah peserta yang terbatas serta waktu dan tempat yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk diplomasi antara lain sebagai berikut :

1. Dialog
2. Persidangan
3. Konferensi Internasional
4. Kunjungan Kenegaraan
5. Seminar Internasional
6. Simposium
7. Negosiasi
8. Lobby

Selain dalam bentuk komunikasi kelompok, diplomasi bisa juga berlangsung dalam bentuk komunikasi bermedia, baik media surat maupun media, antara lain sebagai berikut :

1. Penerangan Masyarakat
2. Hubungan masyarakat internasional
3. Hubungan media atau hubungan pers internasional
4. Korespondensi diplomatik antar lembaga diplomatik (Shoelhi, 2011:84).

2.1.3.3 Diplomasi Multijalur (*Multitrack Diplomacy*)

Multi-track diplomacy adalah konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald. *Multi-track diplomacy* merupakan suatu perluasan dan pembedaan antara *first track diplomacy* dan *second track diplomacy* yang dibuat oleh Joseph Montville di tahun 1982. Pada tahun 1991, Louise Diamond dan McDonald mengembangkan kedua jalur tersebut menjadi sembilan jalur yakni Pemerintah, *conflict resolution professionals*, bisnis, warga negara, penelitian, pelatihan dan pendidikan, aktivisme, agama, pendana atau pemberi dana dan media (Diamond dan McDonald, 2003 : 11).



Sumber: Louise Diamond and John McDonald. 1996 *Multi-Trac Diplomacy; A Systems Approach to Peace Third Edition.* Kumarian Pres.Hal. 15

Gambar 2.1 : Sembilan *Multi-track Diplomacy*

Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan warga negara biasa (Shoelhi, 2011:83).

Pelaksanaan *multi-track diplomacy* didasarkan pada kesadaran dan keinginan aktor non-negara secara umum dari berbagai kalangan yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda untuk melakukan usaha menciptakan *peacemaking* dan *peacebuilding.* Menyikapi bermunculannya aktor-aktor non-negara yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri suatu negara diharapkan bisa memberi kontribusi yang positif bagi pencapaian kepentingan nasional khususnya dalam membangun citra bangsa yang positif di mata dunia internasional serta dalam mengisi dan mengembangkan kerjasama di

berbagai bidang dan mengatasi permasalahan global (Diamond dan McDonald, 2003 : 14).

Multi-track diplomacy telah menjadikan diplomasi bukan hanya tugas diplomat professional ataupun Pemerintah dalam pengertian umum, namun merupakan sebuah upaya untuk merangkul dan melibatkan masyarakat dari berbagai negara dalam suatu hubungan yang harmonis guna mewujudkan persahabatan bangsa-bangsa menuju perdamaian dunia. Selain itu pula, di era globalisasi kini semakin memudahkan hubungan antar negara terjalin dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi transportasi dan komunikasi (*internet*).

Track one diplomacy adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara yakni pemerintah (*government-to-government)* dan merupakan elemen penting dalam diplomasi. *Track one diplomacy* dilakukan dengan mempertimbangkan aspek formal dalam proses pemerintahan karena dilakukan oleh kepala negara ataupun diplomat professional serta wakil-wakil yang telah diberi instruksi oleh negara yang berdaulat melalui negoisasi, mediasi, intervensi dan resolusi konflik (Diamond dan McDonald, 2003 : 26-27).

Track two diplomacy adalah bentuk diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara dalam situasi informal untuk dapat menangani konflik-konflik antar kelompok masyarakat yang tujuannya menurunkan ketegangan dengan cara meningkatkan komunikasi dan saling pengertian untuk menciptakan perdamaian dunia. Menurut McDonald, diplomasi jalur kedua ini adalah sebagai pendukung diplomasi jalur pertama dalam membuka jalan bagi negosiasi-negosiasi dan

kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah (Diamond dan McDonald, 2003 : 37-38).

Track three diplomacy adalah diplomasi bisnis yang melibatkan peran para pelaku bisnis melalui peluang kegiatan kerjasama internasional di bidang ekonomi guna menjalin relasi dengan negara-negara lain melalui komunikasi ataupun jaringan bisnis untuk membantu menciptakan perdamaian dan memperkokoh interaksi kerjasama bisnis dan perekonomian antarnegara (Diamond dan McDonald, 2003 : 52-53)..

Track four diplomacy menggambarkan keikutsertaan masyarakat dalam diplomasi yang disebut *citizen diplomacy.* Peran seluruh lapisan masyarakat akan lebih mudah dan jangkauannya luas dalam menjalin relasi untuk mewujudkan perdamaian dan kerjasama baik itu melalui kegiatan pertukaran, organisasi sukarela dan organisasi non-Pemerintah lainnya, *special-interest groups* hingga para selebritis dinyatakan sebagai aktor baru dalam dunia perpolitikan global. Keterlibatan masyarakat luas dalam diplomasi multi jalur merupakan sebuah kecenderungan baru di era globalisasi sebagai ungkapan kepedulian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terkait kebijakan luar negeri dan perdamaian dunia (Diamond dan McDonald, 2003 : 60-61).

Track five adalah penelitian atau pelatihan dan edukasi yakni perwujudan perdamaian melalui pembelajaran. Untuk ini, terdapat tiga kajian di dalamnya yaitu penelitian yang berhubungan dengan institusi pendidikan (sekolah, universitas), *think tanks* (berbagai penelitian, analisis, dan program studi) dan pusat penelitian kelompok yang berkepentingan khusus. Dengan kata lain ini

adalah sebuah program pelatihan yang menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, serta fasilitas third-party yang terdiri dari edukasi (pendidikan formal dari TK hingga program Doktoral) yang mencakup beragam aspek global tentang studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, konflik analisis, serta manajemen dan resolusi (Diamond & Mc.Donald, 2003: 70)

Track six adalah aktivisme atau perwujudan perdamaian melalui advokasi, dimana lebih menekankan pada aktivisme perdamaian dan environmental dalam hal disarmament, HAM, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu yang diambil pemerintah. Aktivisme tersebut dapat diwujudkan dengan bentuk protes, pendidikan, aturan, dukungan, pengawasan, pendidikan, serta advokasi itu sendiri (Diamond & Mc.Donald, 2003: 87-88)

Track seven, agama yang menggambarkan perwujudan perdamaian melalui *praxis* kepercayaan. Di sini dipelajari bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan yang berorientasi perdamaian oleh komunitas-komunitas spiritual dan religius, serta beberapa gerakan berbasis moral seperti *pacifisme* (percaya bahwa resolusi konflik dengan jalan damai adalah yang paling benar), *sanctuary* (sebagai tempat yang dianggap suci dan mampu melindungi seseorang), anti-kekerasan, aksi sosial, kesetaraan dan keadilan pengampunan, penyesalan, rekonsiliasi, keramahan, pembinaan harapan, belas kasih dan antikekerasan (Diamond & Mc.Donald, 2003: 87-99)

Track eight adalah pendanaan atau perwujudan perdamaian melalui penyediaan aset. Hal ini berhubungan langsung dengan komunitas-komunitas funding yakni baik yayasan maupun filantropis individual yang mampu menyediakan dukungan finansial untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh jalur-jalur lain (Diamond & Mc.Donald, 2003: 108)

Track nine diplomacy yang memainkan peran media tentunya dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan informasi dan aspirasi rakyat hingga menciptakan opini publik guna menjaga perdamaian dan meningkatkan kerjasama. *Track nine diplomacy* adalah bentuk diplomasi bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh berbagai elemen media. Di era globalisasi kini, media semakin berperan penting karena dengan mudah menyebarkan informasi maupun peristiwa teraktual dari seluruh belahan dunia melalui televisi ataupun jaringan internet, sehingga sangat membantu dalam proses penyelenggaran diplomasi suatu negara. Media bertindak sebagai *messenger* dan berada dalam lingkaran sentris untuk menghubungkan peran para aktor *multi-track diplomacy* yang berperan aktif dalam membangun saling pengertian dan toleransi antarnegara, antar budaya ataupun antar agama (Diamond & Mc.Donald, 2003: 120-124)

2.1.3.4 Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*)

Dalam hubungan internasional dikenal 2 (dua) istilah yang popular, yakni *hard power* dan *soft power*. Perbedaan antara keduanya cukup mencolok ketika dilihat dari tiga hal: ciri, instrumen, dan implikasinya. *Soft power* berciri

mengkooptasi atau mempengaruhi dan dilakukan secara tidak langsung. Sedangkan *hard power* bersifat memaksa atau memerintah dan dilakukan secara langsung. Instrumen yang digunakan oleh *hard power* antara lain kekuatan militer *(military forces)*, sanksi, uang, suap *(gratifikasi)*, ataupun bayaran. Adapun instrumen *soft power* yaitu berupa nilai, institusi, kebudayaan, dan kebijakan.

Istilah diplomasi publik (*Softpower Diplomacy*) sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Dean Edmund Gullion dari *Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts Unversity*. Diplomasi publik diciptakan dengan penetapan pada *Fletcher of the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy*, yang mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

> "Diplomasi publik berhadapan dengan pengaruh, sikap publik atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang meliputi hubungan internasional diluar diplomasi internasional; perkembangan opini publik di negara lain; interaksi dari kelompok swasta dan kepentingan di suatu negara terhadap negara lainnya; pemberitaan masalah-masalah luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; komunikasi antara para diplomat dan koresponden asing dan proses dari cultural komunikasi; pusat dari itu semua adalah arus transnasional atas informasi dan ide-ide" (http://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6, diakses tanggal 31 Maret 2015).

Joseph Nye menyatakan pengertian Soft power adalah *"getting others to want the outcomes that you want without inducements ("carrots") or threats ("sticks"). Softpower* ini sendiri melengkapai dua dimensi hard power suatu negara yakni militer ("*carrots*") dan tekanan ekonomi *("sticks")* dimana *soft power* menjadi cara ataupun perilaku ketiga untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. *Hard power* dan *soft power* hakikatnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan pihak lain namun perbedaannya terletak pada perilaku dan sumber daya yang digunakan. Bentuk *softpower* merupakan bentuk *power*

yang mudah menarik perhatian negara lain dengan melalui pendekatan lebih lembut dan tanpa ancaman untuk mencapai apa yang diinginkan oleh suatu negara, seperti melalui sumber daya budaya (Nye, 2004: 5).

Adapun tiga sumber utama dalam *soft power* yakni, daya tarik budayanya, nilai politik dan kebijakan luar negerinya. Budaya adalah seperangkat nilai dan bentuk praktik dalam menciptakan makna terhadap suatu masyarakat yang mana bentuk budaya itu sendiri dapat berupa seni artistik, pendidikan, bahasa kesusastraan, hingga budaya pop yang fokus ke bentuk hiburan untuk masyarakat umum (musik, tarian, film). Jika dalam kebudayaan suatu bangsa mengandung nilai-nilai yang universal dan kebijakan mempromosikan nilai-nilainya dan memiliki daya tarik bagi pihak lain maka hal tersebut dapat meningkatkan popularitas suatu negara karena daya tarik yang dibentuk melalui budaya tersebut (Nye, 2004: 11).

2.1.3.5 Diplomasi Kebudayaan

Istilah kebudayaan dalam kajian ilmu sosial sering diidentikkan dengan nilai-nilai tradisi,adat maupun karakter dari masyarakat yang kemudian mewariskan atmosfir peradaban tersebut dari zaman sejarah. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai:

> "Semua hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia.Karya menghasilkan teknologi kebendaan atau *material culture* yang diperlukan manusia untuk menguasai sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk kehidupan masyarakat" (Soekanto, 2000:172).

Unsur-unsur kebudayaan tersebut kemudian mengalami asimilasi seiring dengan keberadaan perkembangan ilmu HI dalam kegiatan berdiplomasi yang

bermuara menjadi aktifitas yang disebut diplomasi kebudayaan. Penggabungan kata tersebut saecara umum menggambarkan seni interaksi dalam lingkup diplomasi tetapi dengan memanfaatkan instrument dalam estetika kebudayaan.

Diplomasi kebudayaan menurut Wahyuni Kartika menjelaskan:

> "Diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam pencaturan masyarakat internasional.Diplomasi kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Selain itu definisi lain mengenai diplomasi kebudayaan adalah suatu teknik pemanfaatan dimensi kekayaan dalam pencaturan hubungan antar bangsa internasional" (Warsito dan Kartikasari, 2007:25).

Kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat bubungan internasional. Itulah sebabnya sejak dahulu suatu kebudayaan diperkenalkan para diplomat kepada masyarakat internasional untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan pandangan mereka terhadap negaranya.Indonesia pun memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi.

Menurut S.L, Roy ada istilah yang lebih baku dari diplomasi kebudayaan yakni *diplomacy by cultural performance.* Namun khalayak banyak terlanjur menekankan istilah yang sederhana yaitu diplomasi kebudayaan untuk memberi pengertian bahwa diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Tetapi diplomasi dengan mengatasnamakan budaya tidak selalu unsur harus dengan budaya kuno atau tradisional Sebab penggambaran secara makro dari diplomasi kebudayaan adalah usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional melalui unsur kebudayaan termasuk didalamnya pemanfaatan bidang-bidang

ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, pendidikan, sosial budaya maupun kebahasaan dalam pencaturan masyarakat internasional (Warsito dan Kartikasari, 2007:31-33).

Sedangkan kekuatan diplomasi suatu bangsa di kancah internasional banyak ditentukan oleh kekuatan nasional bangsa tersebut. Unsur kekuatan nasional meliputi geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah (Morghentau, 2010:135).

2.1.4 Konsep Bahasa

2.1.4.1 Definisi Bahasa

Bahasa merupakan aspek yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengutip pengertian bahasa menurut pendapat Keraf yang menyatakan ada dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer (Suyanto, 2011: 15).

Bahasa adalah satu sistem, sama dengan sistem- sistem lain, yang sekaligus bersifat sistematis dan bersifat sistemis. Jadi, bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal melainkan dibangun oleh sejumlah substansi (sub sistem fonologis, sintaksis, dan leksikon). Sistem bahasa ini merupakan satu lambang, sama dengan sistem lambang lalu lintas, atau sistem lambang lainnya.

Hanya, sistem lambang lalu lintas, atau sistem lambang atau tanda lain; dan bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Sama dengan sistem lambang lain, sistem lambang bahasa ini juga bersifat arbitrer. Artinya, antara lambang yang berupa bunyi itu tidak memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya (Chaer, 2003: 30).

Setiap bangsa di dunia memiliki bahasanya masing-masing untuk memudahkan komunikasi antar sesama masyarakatnya. Dan bahasa- bahasa tersebut tentunya memiliki sistem bahasa yang berbeda-beda. Sistem bahasa yang berbeda itu ditunjukkan dengan adanya tata bahasa atau *grammar* yang berbedabeda dari masing-masing bahasa. Adanya sistem yang berbeda antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya menunjukkan bahwa bahasa bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik karena setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya (Chaer, 2003: 49).

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang pasti akan mendefinisikan “bahasa” dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan dengan pendekatan teori yang mereka anut. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbitrer yang konvensional yang berkaitan dengan ciri sistem yang bersifat sistematik dan sistemik. Bersifat sistemik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur dan bersifat sistematik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem-subsistem (Soeparno, 2002: 1).

2.14.2 Fungsi Bahasa

Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial.

Berdasarkan pendapat Keraf dalam Finoza yang menyatakan bahwa dalam literatur bahasa, para ahli umumnya merumuskan fungsi bahasa bagi setiap orang ada empat, yaitu (Finoza 2011: 2):

1. Sebagai alat komunikasi;
2. Sebagai alat mengekspresikan diri;
3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial;
4. Sebagai alat kontrol sosial.

Bagi sosiolinguistik konsep bahwa bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit, sebab dikemukakan Fishman bahwa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah "*Who speak what language to whom, when and to what end".* Oleh karena itu, fungsi-fungsi bahasa itu, antara lain, dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode dan amanat pembicaraan (Chaer, 2004: 54)

2.1.4.3 Bahasa sebagai Identitas Bangsa

Kebudayaan memang sangat kompleks meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Demikian pula kebudayaan nasional Indonesia

yang memiliki sifat khas, dan dapat memberikan kebanggan kepada masyarakat Indonesia sebagai pemiliknya.

Dalam komunitas sosial, salah satu cara yang paling dasar dalam menentukan identitas dan mempengaruhi orang lain memandang diri kita adalah melalui bahasa. Adapun sarana linguistik yang dominan digunakan adalah dengan pemberian ‘nama. ‘Nama’ akan membuat sesuatu menjadi berbeda dari yang lain, karena nama memiliki arti yang penting bagi penyandangnya. Namun sebuah nama dapat menimbulkan masalah jika tidak cocok dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakatnya. Orang tidak bisa membentuk sendiri identitas sosial yang diinginkannya, karena identitas itu terkait dengan cara orang lain memandang dirinya. Karena pentingnya bahasa sebagai sarana pembentukan identitas, maka bahasa memiliki pengaruh yang besar terhadap kendali sosial. Hubungan antara bahasa dan identitas merupakan hubungan yang kompleks, karena dipengaruhi oleh faktor individu, sosial, dan politik, yang secara bersama-sama membentuk identitas (Thomas & Wareing 2007:223).

2.1.4.4 Bahasa sebagai Komunikasi Antarbudaya

Liliweri (2004: 9-15) mengemukakan bahwa komunikasi antarbudaya sendiri dapat dipahami sebagai pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budaya. Dalam rangka memahami kajian komunikasi antarbudaya dikenal beberapa asumsi, yaitu:

1. Komunikasi antarbudaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan.

2. Dalam komunikasi antarbudaya terkandung isi dan relasi antarpribadi.

3. Gaya personal mempengaruhi komunikasi antarpribadi

4. Komunikasi antarbudaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian.

5. Komunikasi berpusat pada kebudayaan.

6. Efektivitas antarbudaya merupakan tujuan komunikasi antarbudaya.

Mengutip pendapat Habermas, bahwa dalam setiap proses komunikasi (apapun bentuknya) selalu ada fakta dari semua situasi yang tersembunyi di balik para partisipan komunikasi. Menurutnya, beberapa kunci iklim komunikasi dapat ditunjukkan oleh karakteristik antara lain; suasana yang menggambarkan derajat kebebasan, suasana dimana tidak ada lagi tekanan kekuasaan terhadap peserta komunikasi, prinsip keterbukaan bagi semua, suasana yang mampu memberikan komunikator dan komunikan untuk dapat membedakan antara minat pribadi dan minat kelompok. Dari sini bisa disimpulkan bahwa iklim komunikasi antarbudaya tergantung pada 3 dimensi, yakni perasaan positif, pengetahuan tentang komunikan dan perilaku komunikator (Liliweri, 2004: 48).

Menurut Samovar dan Porter, untuk mengkaji komunikasi antarbudaya perlu dipahami hubungan antara kebudayaan dengan komunikasi. Melalui pengaruh budayalah manusia belajar komunikasi, dan memandang dunia mereka melalui kategori-kategori, konsep-konsep, dan label-label yang dihasilkan kebudayaan. Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap suatu objek sosial atau peristiwa. Cara-cara manusia berkomunikasi, keadaan berkomunikasi, bahkan bahasa dan gaya bahasa yang

digunakan, perilaku-perilaku non-verbal merupakan respons terhadap dan fungsi budaya (Liliweri, 2001: 160).

2.1.4.5 Bahasa Dalam Hubungan Internasional

Dalam hubungan internasional setiap negara mempunyai bahasa yang dijadikan sebagai bahasa nasional setiap negara tetapi ada beberapa bahasa dijadikan sebagai bahasa Internasional yang digunakan dan dipelajari hampir diseluruh dunia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam interaksi antar Negara di dunia internasional salah satunya bahasa merupakan sebagai alat komunikasi antar Negara yang memiliki latar belakang dan identitas satu sama lain sehingga akan menimbulkan saling pengertian antar negara. Bahasa nasional dari suatu negara yang dijadikan sebagai bahasa internasional dapat menarik negara lain untuk mempelajari budaya yang dimiliki oleh negara bersangkutan. dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu negara dikancah internasional sehingga negara bersangkutan lebih dikenal. Bahasa menunjukan identitas suatu bangsa dan jati diri suatu bangsa di dunia internasional yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperlihatkan keunggulan dalam bidang kebudayaan dibandingkan negara lain dan menunjukan eksistensinya di dunia internasional sehingga suatu bangsa dapat diakui oleh bangsa lain (Thomas & Wareing 2007:223).

Secara kultural dengan adanya bahasa nasional yang dijadikan bahasa internasional dapat mengangkat peradaban suatu bangsa dalam bentuk kearifan

lokal yang menjadi daya tarik suatu negara di dunia internasional dan dapat dijadikan sebagai sarana diplomasi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam bidang kebudayaan. Bahasa memiliki peran untuk mengangkat harkat martabat bangsa di dunia internasional sebagai negara yang lebih maju dibandingkan negara lain sehingga suatu negara akan lebih diakui keberadaanya dan dapat meningkatkan daya tawar suatu negara dan dapat memberikan pengaruh yang kuat terdapap negara lain dalam forum-forum internasional. Dengan adanya bahasa internasional setiap saling kominikasi antar budaya dengan melakukan kerjasama tanpa melihat kultur social masing-masing negara dalam bidang ekonomi, politik, dan social budaya untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya nya masing-masing dan pada akhirnya kebudayaan yang miliki termasuk bahasa menyebar luas ke mancanegara sehingga negara tersebut semakin dikenal dimancanegara (Liliweri, 2001: 160).

2.1.4.6 Bahasa Internasional

Bahasa internasional menurut Mario Pei dalam Wahya bahasa internasional (*international language*, *interlanguage*) merupakan istilah umum untuk semua bahasa yang diciptakan atau diusulkan untuk diadopsi untuk tujuan komunikasi internasional; sebagai bahasa alami, seperti bahasa Inggris dan Perancis; dimodifikasi seperti bahasa Inggris dasar; atau dibentuk, seperti Esperanto. Richards et al berpendapat bahwa bahasa internasional adalah sebuah bahasa yang secara tersebar digunakan sebagai bahasa asing atau bahasa kedua, yakni sebagai bahasa dalam komunikasi internasional (Wahya, 2010 : 2-3) .

Bahasa internasional merupakan bahasa yang banyak digunakan oleh setiap negara dan memiliki jumlah penutur terbanyak sebagai salah satu bahasa yang dapat digunakan dalam pergaulan internasional baik formal maupun informal setelah bahasa nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dengan semakin majunya teknologi, semua bangsa-bangsa di dunia memerlukan adanya persahabatan dan kerjasama. Interaksi dan sosialisasi tidak saja terjadi pada antar individu tetapi juga antar negara. Oleh sebab itu muncul bahasa internasional yang dijadikan sebagai bahasa antar negara untuk saling melakukan komunikasi lnternasional dalam pergaulan internasional. Bahasa Internasional dianggap *prestigious* atau bahasa yang memiliki status yang tinggi seperti bahasa PBB, seperti bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan China akibatnya bahasa tersebut memiliki peminat yang banyak untuk dipelajari dan dikuasai sebagai bahasa yang memiliki status *prestigious* yang memiliki peran penting dalam komunikasi internasional dalam pergaulan internasional (Artini dan Nitiasih, 2014: 4-7)

2.2 Kerangka Pemikiran

Perwita dan Yani yang mengemukakan bahwa Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Kerjasama Internasional yang awalnya dilakukan hanya pada permasalahan politik suatu negara tetapi saat ini berkembang isu-isu baru isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan. Dalam penelitian yang akan dilakukan

Indonesia melakukan interaksi melalui kerjasama internasional dengan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara.

Indonesia melakukan interaksi melalui kerjasama internasional dengan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara dilatarbelakangi atas kepentingan Indonesia sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh T. May. Rudy bahwa Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan untuk itu Indonesia memperkenal budaya Indonesia terutama bahasa Indonesia kepada negara lain sehingga kepentingan nasional Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagia bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara dapat tercapai

Dalam mencapai kepentingan nasionalnya Indonesia menjalankan diplomasi dengan negara-lain yang merupakan strategi yang dijalankan oleh Indonesia dengan tujuan untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain melalui perundingan, lobby, seminar internasional dan lain-lain sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan oleh semua negara di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan konsep diplomasi menurut Barston yang mendefinisikan bahwa diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.

Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya dilakukan oleh negara saja tetapi melibatkan masyarakat yang meliputi LSM/NGO, kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan warga negara biasa sehingga dapat mempercepat diplomasi yang disebut dengan *Multitrack Diplomacy*.

Sesuai dengan kepentingan Indonesia yang menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional, Indonesia melakukan diplomasi kebudayaan karena bahasa merupakan salah satu aspek dalam kebudayaan. Diplomasi Kebudayaan memberikan pengertian bahwa diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara-negara anggota ASEAN untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Melalui diplomasi kebudayaan, Indonesia memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam percaturan masyarakat Internasional terutama di kawasan Asia Tenggara dalam hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Diplomasi kebudayaan tidak hanya sekedar *art performance,* tapi lebih daripada itu, Karena diplomasi kebudayaan merupakan *soft power,* pelaksanaan politik dengan memanfaatkan hal-hal budaya, tanpa pengunaan kekerasan. Bahasa dan kesenian merupakan dua unsur budaya yang amat krusial dalam diplomasi kebudayaan, ditambah dengan bahasa Indonesia menjadi bahaha resmi dibeberapa negara di kawasan Asia Tenggara.

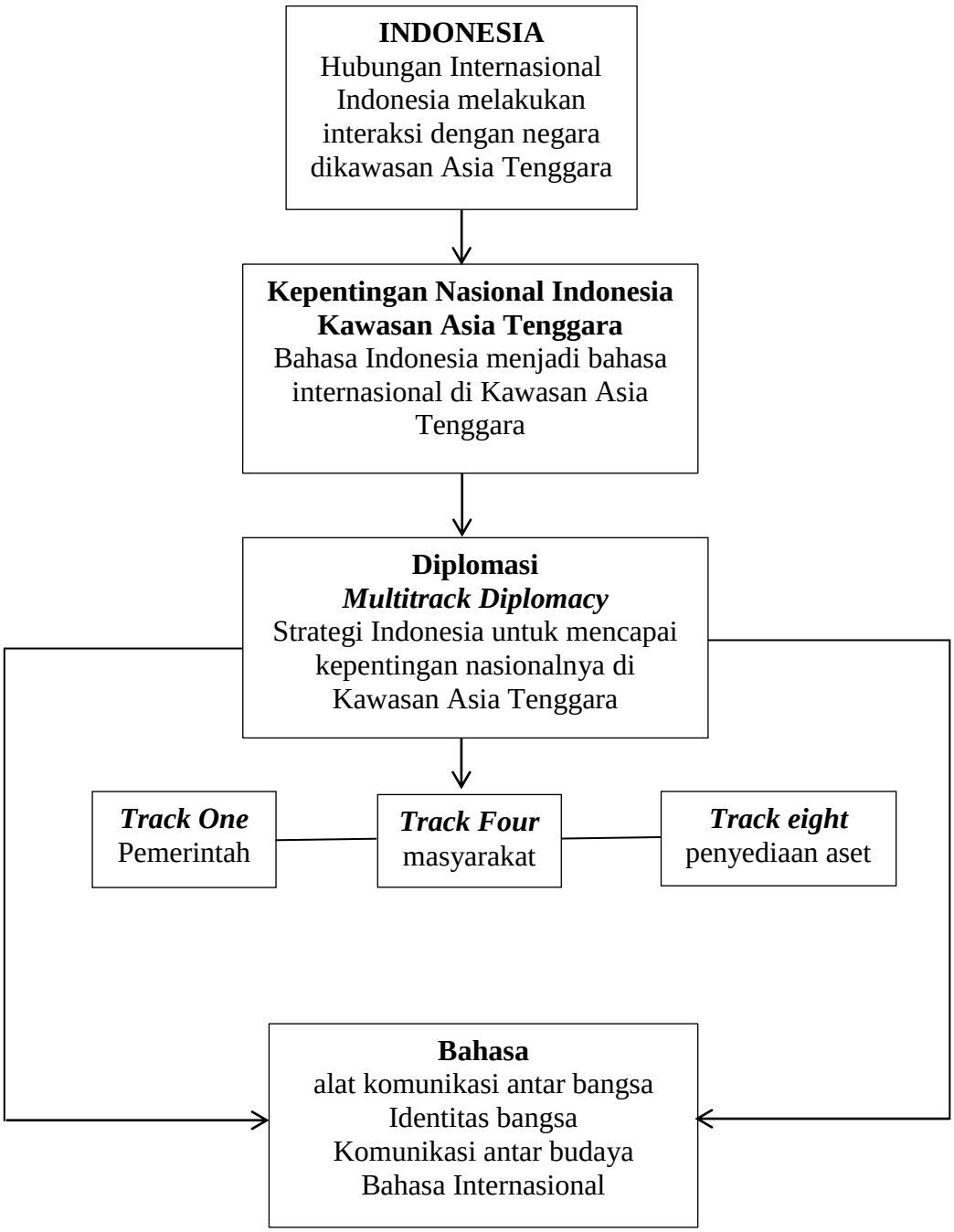
Dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, Indonesia melakukan diplomasi kebudayaan terutama pada aspek kebahasaan melalui kekuatan nasional diantaranya letak geografis, jumlah penduduk, kemampuan industri dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai kekuatan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara anggota ASEAN sehingga keinginan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia dapat tercapai sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Morghenthau.

Bahasa dijadikan sebagai salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan negara lain dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia melalui pertemuan-pertemuan internasional dan media massa dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan Indonesia kepada negara lain sehingga dapat kepentingan nasional Indonesia dapat terpenuhi melalui jalur jalur diplomatik yang dilakukan perwakilan negara dan maupun jalur non-pemerintah yang dilakukan masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas Indonesia memliki kepentingan nasional dimana Indonesia yang menginginkan bahasa Indonesia menjadi internasional tetapi tentu gagasan tersebut tidak mudah untuk direalisasikan karena beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memiliki bahasa tersendiri sesuai dengan identitas nasional setiap negara masing-masing. Untuk itu Indonesia melakukan berbagai upaya yang dapat ditempuh sehingga kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai.

Indonesia melakukan berbagai upaya dengan melakukan interaksi dengan negara lain melalui komunikasi sehingga negara lain yang berada dikawasan Asia Tenggara dapat menerima penggunaan bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melakukan komunikasi melalui diplomasi dengan negara-negara anggota ASEAN sebagai upaya dan strategi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasiona.

Untuk menjadikan bahasa sebagai bahasa internasional Indonesia melakukan diplomasi kebudayaan melalui kegiatan-kegiatan budaya termasuk bahasa yang dilakukan di negara lain untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan membuat kepentingan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dapat tercapai. Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

⟶ : menunjukkan arah aliran dari satu proses ke proses yang lain

——— : menunjukkan arah aliran dari tindakan yang dilakukan